

PERAN STAKEHOLDER DALAM MENGOPTIMALKAN PEMANFAATAN APLIKASI JAKI UNTUK MEWUJUDKAN SMART GOVERNANCE

Srinata Salsabila, Maesaroh, Nina Widowati

Departemen Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 50275
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman : <http://fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Smart City is a concept to maximize the use of technology in the order of a city. Smart governance is one of the indicators of the creation of a Smart City. One of the efforts to realize this is by creating the JAKI application. The JAKI application is the result of government cooperation with stakeholders, namely the community, government and the private sector. Optimal utilization is one of the important indicators that influence the realization of smart governance in Jakarta. Therefore, the purpose of this study is to find out who are the stakeholders involved in optimizing the use of the JAKI application and to find out and analyze how the role of stakeholders in optimizing the use of the JAKI application to realize smart governance in Jakarta. This research uses descriptive qualitative methods with data collection techniques, namely interviews and observations. The results showed that the utilization of the JAKI application was still not optimal because there were still many people who did not know the function of the JAKI application, few stakeholders who were directly involved and the role of stakeholders who were not good at optimizing the use of the application.

Keywords: Role of stakeholders, JAKI application, Smart Governance

ABSTRAK

Smart City merupakan sebuah konsep untuk memaksimalkan pemanfaatan teknologi dalam tatanan suatu kota. *Smart governance* menjadi salah satu indikator terciptanya sebuah *Smart City*. Salah satu upaya untuk mewujudkannya adalah dengan menciptakan aplikasi JAKI. Aplikasi JAKI merupakan hasil kerjasama pemerintah dengan para *stakeholder* yakni masyarakat, pemerintah dan swasta. Pemanfaatan yang optimal menjadi salah satu indikator penting yang berpengaruh dalam mewujudkan *smart governance* di Jakarta. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui siapa saja *stakeholder* yang terlibat dalam mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi JAKI dan mengetahui serta menganalisis bagaimana peran yang dilakukan *stakeholder* dalam mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi JAKI untuk mewujudkan *smart governance* di Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yakni wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan aplikasi JAKI masih belum optimal karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui fungsi dari aplikasi JAKI, sedikitnya *stakeholder* yang terlibat langsung serta peran *stakeholder* yang belum baik dalam mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi tersebut.

Kata Kunci: Peran *stakeholder*, aplikasi JAKI, *Smart Governance*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbagai macam aktivitas berpusat di Jakarta mulai dari pemerintahan sampai kegiatan ekonomi dan bisnis di Indonesia. Sebagai ibu kota, Jakarta erat kaitannya dengan modernitas. Segala arus pusat informasi dan teknologi jauh lebih cepat berkembang ketimbang kota lainnya. Perkembangan teknologi dan masifnya arus informasi, mendorong percepatan globalisasi di kota Jakarta, termasuk pemanfaatannya itu sendiri.

Hal tersebut mampu menciptakan entitas tersendiri bagi publik terhadap kota

Jakarta sehingga hal ini mampu menjadi magnet untuk para pendatang dan meningkatkan jumlah angka penduduk tiap tahunnya. Terlebih lagi, Jakarta memiliki angka pendapatan per kapita tertinggi di Indonesia yang dapat menjadi salah satu faktor pendorong masyarakat untuk melakukan urbanisasi dan mencari peruntungan di Jakarta. Masifnya urbanisasi yang dilakukan berhasil menjadikan Jakarta sebagai salah satu kota yang memiliki jumlah penduduk terbesar di dunia.

Angka penduduk di Jakarta membengkak hingga lebih dari 10 juta jiwa. Dilansir data dari Dukcapil, jumlah penduduk Kota Jakarta pada tahun 2021 sebanyak 10,6 juta jiwa. Menimbulkan persoalan baru yang tak bisa dihindari dalam kehidupan bermasyarakat di tengah hiruk pikuknya ibu kota.

Konsep *Smart City* hadir sebagai inovasi untuk menjawab persoalan tersebut Konsep *Smart City* dapat dikatakan sebagai kota yang memakai sumber daya yang ada dengan pengelolaan yang bijaksana dengan melibatkan masyarakat serta mengintegrasikan antara infrastruktur komunikasi dan teknologi untuk menciptakan kualitas hidup, mnegoptimalkan pelayanan publik, menciptakan kesejahteraan warganya dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Jakarta telah memanfaatkan IoT dan mengimplementasikannya ke dalam konsep *Smart City* pada tahun 2014. Jakarta *Smart City* bertujuan untuk memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi guna memahami, mendapat informasi dan mengatur berbagai sumber daya dalam sebuah kota secara efisien dan efektif sehingga mampu guna mengoptimalkan pelayanan publik, memberikan dukungan pada pembangunan

yang berkelanjutan serta menyediakan solusi untuk berbagai masalah di perkotaan.

Jakarta *Smart City* direncanakan untuk memaksimalkan pemanfaatan teknologi untuk mengoptimalkan pelayanan publik di Jakarta. Teknologi yang telah dikembangkan pun ditransformasikan menjadi digital dengan akses yang terbuka untuk masyarakat. *Smart City*, menurut Cohen (2014), didefinisikan sebagai sebuah aproksimasi yang meluas dan tergabung dalam pelaksanaan sebuah kota yang memiliki efektivitas tinggi dengan membuat kualitas hidup penduduk meningkat dan membuat ekonomi daerah menjadi bertumbuh. Enam kelompok dimensi *Smart City* menurut Cohen mengandung beberapa indikator sebagai berikut.

Tabel 1.1 Dimensi Smart City

| No (1) | Dimensi (2) | Indikator (3) |
|--------|-------------------|-----------------------------------|
| 1. | Smart Environment | Smart buildings |
| | | Resources Management |
| | | Sustainable Urban Planning |
| 2. | Smart Economy | Entrepreneurship & Innovation |
| | | Productivity |
| | | Local & global interconnectedness |
| 3. | Smart Governance | Online services |
| | | Infrastructure |
| | | Open Government |

| (1) | (2) | (3) |
|-----|----------------|-------------------------------|
| 4 | Smart Living | Culturally Facility |
| | | Safe |
| | | Healthy |
| 5 | Smart Mobility | Multi-modal acces |
| | | Clean & Non-Motorized Options |
| | | Integrated ICT |
| 6 | Smart People | Embrace Creativity |
| | | Inclusive Society |
| | | 21st Century Education |

Dimensi utama dalam *Smart City* yang berfokus pada pentingnya pemerintah dan masyarakat untuk bekerja sama agar menciptakan tatanan pemerintah yang efektif, efisien, adil, demokrasi, dan jujur serta perbaikan yang berkelanjutan adalah *Smart Governance*. Untuk mewujudkannya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan para *stakeholder* dengan berinovasi menciptakan aplikasi JAKI.

JAKI atau Jakarta Kini merupakan aplikasi super yang diciptakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan dikembangkan oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Jakarta *Smart City* yang menjadi bagian dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta. Aplikasi JAKI membuka kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam ranah publik. JAKI menyediakan layanan satu pintu untuk

membantu kehidupan sehari - hari warga Jakarta, salah satunya dengan adanya fitur Laporan Warga, dimana masyarakat bisa melaporkan sebuah kejadian, fenomena, peristiwa, kerusakan, dan lain – lain kepada pemerintah Kota Jakarta sehingga nantinya merespon hal tersebut dengan cepat. BLUD Jakarta *Smart City* bekerja sama dengan beberapa dinas yang menyediakan layanan publik di aplikasi JAKI, seperti Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Tabel 1.2 Pengguna Aplikasi JAKI

| Tahun | Jumlah Pengguna |
|--------------|------------------|
| 2020 | 1,155,711 |
| 2021 | 2,669,970 |
| 2022 | 2,217,889 |
| 2023* | 1,151,158 |
| Total | 5,736,510 |

Sumber: data yang diolah oleh peneliti

Data yang diperoleh dari BLUD Jakarta *Smart City* terkait pengguna aplikasi JAKI menunjukkan bahwa aplikasi JAKI telah digunakan oleh 5 juta penduduk yang ada di DKI Jakarta. Dengan kata lain, sudah hampir setengah dari seluruh penduduk DKI Jakarta telah menggunakan aplikasi tersebut. Dimana terdapat 10,64 juta jiwa penduduk di DKI Jakarta per tahun 2022 kemarin. Namun, belum dapat dipastikan bahwa

pengguna yang tercatat dalam sistem adalah pengguna aktif.

Untuk memaksimalkan pemanfaatan aplikasi JAKI dengan jumlah pengguna yang tercatat, Pemprov DKI Jakarta bersama dengan BLUD Jakarta Smart City berupaya memperkenalkannya melalui media sosial instagram dengan nama akun Jakisuperapp, tetapi cara tersebut dinilai belum efektif karena jumlah pengikut yang masih sedikit menunjukkan bahwa akun media sosial tersebut belum dapat menjangkau masyarakat lebih luas. Upaya selanjutnya yakni penayangan video iklan di jalan yang juga kurang memiliki pengaruh signifikan pasalnya hanya berada di satu hingga dua titik saja di pusat kota.

Penelitian terdahulu dengan judul ”Partisipasi Masyarakat melalui Penerapan Aplikasi Jaki pada Jakarta Smart City (Studi Kelurahan Jati Padang)” menyatakan bahwa indikator keterlibatan masyarakat masih kurang karena masih banyak masyarakat yang belum tahu JAKI sebagai media pengaduan yang dapat disebabkan oleh kurangnya promosi dan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan demikian, perlu adanya kerjasama pemerintah dengan para stakeholder untuk bisa mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi JAKI.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain metode kualitatif. Lokasi penelitian berada di Kelurahan Kelapa Dua, Jakarta Barat dengan subjek penelitian meliputi BLUD Jakarta Smart City, Kelurahan Kelapa Dua, RW, RT dan masyarakat disana. Data yang digunakan berupa data primer yang didapatkan langsung dari hasil wawancara dan data sekunder yang didapatkan dari dokumen atau literatur. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara dan studi pustaka dengan teknik analisis dan interpretasi data melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pengujian kualitas data menggunakan teknik triangulasi data dengan membandingkan hasil temuan dari informan satu dengan informan lain dan sumber data yakni wawancara dengan studi dokumen

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Identifikasi *Stakeholder* dalam Pengoptimalan Pemanfaatan Aplikasi JAKI

A. Stakeholder Primer

Berdasarkan teori Maryono dalam (Ariyanto, 2021) *stakeholder* primer ialah *stakeholder* yang merasakan dampak secara langsung dari sebuah kebijakan baik itu negatif maupun positif serta memiliki kepentingan

pada kegiatan tersebut sehingga penting untuk dilibatkan dalam seluruh tahapan. *Stakeholder* primer seringkali menjadi penentu utama untuk mengambil sebuah keputusan sebab *stakeholder* primer yang akan merasakan langsung dampaknya. Dalam pengoptimalan pemanfaatan aplikasi JAKI, RW 01, RT 05 dan masyarakat di kelurahan Kelapa Dua menjadi *stakeholder* primer.

Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait aplikasi JAKI dan tidak semua masyarakat merasakan dampak dari aplikasi secara berkelanjutan. RW 01 dan masyarakat hanya merasakan dampak aplikasi JAKI saat masa Covid saja, berbeda dengan dampak yang dirasakan oleh RT 05 yang merasa adanya perbedaan pola sosial dalam melaporkan sebuah masalah. Pihak RT 05 merasa ‘dilangkahi’ jika masyarakat langsung melaporkan masalah ke Pemprov DKI Jakarta melalui aplikasi JAKI.

B. *Stakeholder* Sekunder

Stakeholder sekunder merupakan *stakeholder* yang tidak

memiliki kepentingan maupun tanggung jawab secara langsung pada program tersebut namun memiliki kepedulian besar terhadap proses pengembangan dari program. Mereka dapat memberikan pengaruh dalam pengambilan keputusan karena mereka dapat berperan dalam memberi saran masukkan dalam program atau kebijakan tersebut (Ariyanto & Marom, 2021). Dilihat dari pengertiannya, *stakeholder* sekunder dapat berupa fasilitator maupun pihak yang memberikan dukungan dalam keberjalanan pengoptimalan pemanfaatan aplikasi JAKI.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, pihak Kelurahan Kelapa Dua bersama dengan JakLingko menjadi *stakeholder* sekunder karena mendukung upaya yang dilakukan oleh pihak BLUD Jakarta Smart City dalam mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi JAKI. Pihak swasta seperti Grab, Gmaps, Nodflux, Jakarta Aman, Gojek, BukaLapak, Shopee, Tokopedia tidak terlibat secara langsung dalam mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi JAKI melainkan hanya menaruh aplikasimereka sebagai fitur di aplikasi JAKI, sebenarnya masih dianggap

kurang untuk bisa dikatakan sebagai stakeholder sekunder karena dukungan yang diberikan tidak berfokus pada penyebarluasan pemanfaatan aplikasi JAKI. Seharusnya, mereka bisa memberi dukungan berupa membantu atau bekerjasama untuk sosialisasi dan promosi terkait aplikasi JAKI.

C. *Stakeholder* Kunci

Stakeholder kunci menurut Maryono (dalam Ariyanto, 2021) merupakan *stakeholder* dengan kewenangan legal, pengaruh serta kepentingan yang tinggi dalam mengambil keputusan dan membuat sebuah kebijakan. BLUD Jakarta Smart City menjadi pihak pemrakarsa dari aplikasi JAKI dibantu dengan SKPD lain yang terdiri dari Bappenda, Dinas Penanaman Modal, Disdukcapil, Dinas Perhubungan dan Dinas Pemuda dan Olahraga memberikan pelayanannya melalui aplikasi JAKI.

BLUD Jakarta Smart City dan SKPD terkait yang berada di bawah naungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki kewenangan dalam pembuatan legislasi terkait aplikasi JAKI yang kemudian akan

dikeluarkan dengan mengatasnamakan Plt. Gubernur DKI Jakarta.

2. Peran *Stakeholder* dalam Mengoptimalkan Pemanfaatan Aplikasi JAKI

A. Policy Creator

Dalam Nugroho (2014) *Policy Creator* memiliki peran untuk menentukan dan mengambil keputusan dalam sebuah kebijakan. Setelah melakukan wawancara dan studi pustaka, *stakeholder* yang berperan sebagai *Policy Creator* adalah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Jakarta *Smart City*.

B. Koordinator

Koordinator merupakan *stakeholder* yang berperan untuk melakukan koordinasi dengan *stakeholder* lain yang ikut berperan dalam proses pengoptimalan pemanfaatan aplikasi JAKI untuk mewujudkan *Smart Governance* di Jakarta.

Dari *stakeholder* yang terlibat dalam pengoptimalan pemanfaatan aplikasi JAKI, dapat diklasifikasikan bahwa BLUD Jakarta *Smart City* dan pihak Kelurahan menjadi koordinator. Pihak BLUD Jakarta

Smart City mengkoordinasi seluruh struktur birokrasi yang ada di bawah untuk melakukan upaya pengoptimalan tersebut baik koordinasi internal maupun eksternal.

C. Fasilitator

Fasilitator merupakan *stakeholder* yang berperan untuk memberikan fasilitas selama proses kerja sama tersebut. Adapun fasilitas yang diberikan dapat berupa fisik maupun fasilitas non fisik. Pada pengoptimalan pemanfaatan aplikasi JAKI, aturan main telah ditentukan oleh pihak BLUD Jakarta *Smart City* dan Plt. Gubernur sebagai pihak legislatif yang memiliki kewenangan tersebut.

Tidak hanya aturan main, pihak BLUD Jakarta *Smart City* juga memberikan sosialisasi dan pelatihan berupa Bimtek atau Bimbingan teknis yang diberikan secara langsung kepada perangkat daerah di tiap SKPD dan di kelurahan dengan bekerja sama oleh kelurahan terkait.

Kelurahan Kelapa Dua menjadi salah satu kelurahan yang ikut serta dalam mendukung dan mempersiapkan pelaksanaan dari

sosialisasi yang diadakan di kelurahannya.

D. Implementor

Implementor merupakan *stakeholder* yang berperan langsung di lapangan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Ada tiga indikator yang mempengaruhi peran seorang implementor komunikasi, sumberdaya dan struktur birokrasi. BLUD Jakarta *Smart City*, Kelurahan Kelapa Dua, RW 01, RT 05 serta masyarakat di Kelapa Dua menjadi pelaksana kebijakan dalam pengoptimalan aplikasi JAKI.

BLUD Jakarta *Smart City* masih mengalami kekurangan pada struktur birokrasi yang dirasa masih terlalu minim pihak lain yang dilibatkan untuk pengoptimalan pemanfaatan aplikasi JAKI. Kelurahan Kelapa Dua juga kurang maksimal sebagai seorang implementor karena kurangnya komunikasi menyeluruh sehingga menimbulkan diseminasi informasi di wilayah tersebut. Pihak Kelurahan tidak memiliki kewenangan yang cukup untuk bisa mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi JAKI sehingga upaya terbatas.

RW 01 dan RT 05 juga masih sangat kurang untuk menjadi seorang implementor, mereka tidak memenuhi seluruh indikatornya sebab komunikasi yang dilakukan masih sangat minim bahkan tidak melakukan komunikasi sama sekali, sumberdaya manusia yang memiliki keterbatasan fisik dan minimnya pengetahuan tentang aplikasi JAKI serta tidak memiliki struktur birokrasi sebab bergerak sendiri sebagai seorang individu.

Dengan tidak terpenuhinya indikator tersebut, maka mereka belum bisa menjalankan perannya dengan baik dan peran implementor masih belum terlaksana secara optimal. RW 01 dan RT 05 termasuk sebagai *stakeholder* primer karena mereka merasakan dampak langsung dari kebijakan tersebut meski tidak dilibatkan langsung dalam proses perumusan kebijakan oleh *stakeholder* kunci maupun *stakeholder* yang menjalankan peran sebagai *policy creator*

E. Akselerator

Akselerator merupakan stakeholder yang memiliki peran dalam

menunjang keberjalanan suatu kebijakan atau kerjasama yang dapat memberikan dampak untuk mempercepat pelaksanaan dari target awal. Hanya pihak BLUD Jakarta Smart City yang melakukan percepatan kebijakan penggunaan aplikasi JAKI.

KESIMPULAN

Dalam mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi JAKI terdapat beberapa *stakeholder* yang terlibat sesuai dengan peran yang dilakukan diantaranya adalah BLUD Jakarta Smart City, Bappenda, Dinas Penanaman Modal, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perhubungan, Dinas Pemuda dan Olahraga yang termasuk dalam *stakeholder* kunci dan berperan sebagai *policy creator*. RW 01 dan RT 05 Kelapa Dua dan masyarakat yang termasuk sebagai *stakeholder* primer dan berperan sebagai implementor. Selanjutnya terdapat Kelurahan Kelapa Dua dan pihak swasta seperti Grab, Gojek, Tokopedia, Shopee, BukaLapak, Nodlux, Jakarta Aman, JakLingko, Google Maps dan WRI Indonesia yang berperan sebagai fasilitator. Peran koordinator dilaksanakan oleh BLUD Jakarta Smart City dan Kelurahan Kelapa dua, sedangkan peran akselerator hanya

dijalankan oleh BLUD Jakarta Smart City bersama dengan JakLingko.

Peran *stakeholder* yang dilakukan masih belum optimal karena belum sesuai dengan kedudukan yang dimiliki masing – masing *stakeholder*. Dibuktikan dengan pihak swasta yang tidak berperan secara signifikan untuk mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi JAKI. Sebagai *stakeholder sekunder* seharusnya pihak swasta dapat membantu dalam memberikan fasilitas maupun percepatan kebijakan dengan melakukan promosi, namun peran tersebut masih bergantung pada BLUD Jakarta Smart City saja. Sama halnya dengan masyarakat sebagai *stakeholder primer* yang tidak dilibatkan dalam pembuatan atau perencanaan kebijakan.

Dalam keberjalanannya, BLUD Jakarta Smart City kurang melibatkan masyarakat dan pihak swasta sehingga pelaksanaan peran *policy creator*, implementor dan akselerator masih belum optimal sehingga banyak masyarakat yang belum mengetahui aplikasi dan fitur dari JAKI. Dengan demikian, belum optimalnya peran *stakeholder* berpengaruh pada belum maksimalnya pemanfaatan aplikasi JAKI oleh masyarakat.

SARAN

Untuk menjalankan sebuah kebijakan dengan skala yang besar maka perlu memperhatikan *stakeholder* yang dilibatkan dalam prosesnya, mengacu pada permasalahan yang ditemui yaitu masih sedikit *stakeholder* yang terlibat dan peran yang dilakukan masih belum sesuai dengan kedudukannya masing-masing, maka saran atau rekomendasi yang dapat disampaikan oleh penulis ialah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan peran keterlibatan dari masing – masing *stakeholder* agar sesuai dengan kedudukannya dalam mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi JAKI yang dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Untuk meningkatkan peran *policy creator*, BLUD Jakarta Smart City sebagai pelopor yang menjalankan peran tersebut dapat melibatkan masyarakat dalam proses perumusan atau perencanaan sebab masyarakat menjadi *stakeholder primer* yakni pihak atau kelompok sasaran yang merasakan dampak langsung dari sebuah kebijakan sehingga mendekati pada keseimbangan penawaran dan permintaan kebijakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

b. Untuk meningkatkan peran implementor, upaya yang dapat dilakukan yaitu:

- BLUD Jakarta Smart City bersama dengan Kelurahan perlu meningkatkan pemahaman para stakeholder yang berperan sebagai implementor dengan menyamakan sudut pandang agar bisa melaksanakan kebijakan tersebut di lapangan tanpa ada kesulitan hingga membantu pengoptimalan pemanfaatan aplikasi JAKI
- BLUD Jakarta Smart City mengikutsertakan seluruh *stakeholder* yang berada pada hierarki pemerintah provinsi sampai ke bawah seperti pihak Walikota dan Kecamatan untuk bisa ikut turun ke lapangan menjadi implementor

c. Untuk meningkatkan peran akselerator, upaya yang dapat dilakukan yaitu:

- BLUD Jakarta Smart City perlu meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta yang

sudah terlibat maupun belum agar dapat membantu proses promosi baik secara fisik maupun digital untuk membantu pengoptimalan pemanfaatan aplikasi JAKI karena pihak swasta memiliki sumber daya lebih daripada pemerintah dan memiliki target pasarnya sendiri sehingga dapat memberikan hasil atau dampak yang lebih signifikan dalam mendukung pengoptimalan pemanfaatan aplikasi JAKI.

- BLUD Jakarta Smart City menggunakan strategi marketing yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman, adapun cara yang bisa dicoba yaitu melakukan *endorsement* kepada *influencer* serta memasang iklan pada media sosial untuk bisa memfasilitasi promosi dan mampu menarik perhatian masyarakat secara digital

2. Untuk meningkatkan efektivitas kerja pada tiap *stakeholder* dalam menjalankan perannya, BLUD Jakarta Smart City sebagai pelopor

dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan ini perlu membuat adanya kesepakatan untuk pembagian kerja antar *stakeholder* dengan merata sesuai dengan kedudukan dan kepentingannya agar setiap *stakeholder* mengetahui apa yang harus dipersiapkan dan diperlakukan serta meminimalisir untuk memberatkan salah satu pihak saja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Cohen, B. (2014). *The Smartest Cities in The World 2015: Methodology*. Fast Company
- Noor, M., Suaedi, F., & Mardiyanta, A. (2022). *Collaborative Governance Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik*.
- Pasolong, H. (2019). *Teori Administrasi Publik*. Cetakan 9. Bandung: CV. Alfabeta.
- Shafritz J.M., Ott J.S & A.C. Hyde, 1991, *Public Management :The Essential Reading*, Chicago: Lyceum Books/Nelson-Hall Publisher.

Jurnal

- Ariyanto, E. D., & Marom, A. (2021). Analisis Peran Stakeholder Dalam Program Pilah Sampah Di Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 10(2), 221-239.
- Ayuningtyas, R. H., & Rahman, A. Z. (2019). Komunikasi Kebijakan Publik dalam Implementasi Program Kampung Tematik di Kelurahan Rejomulyo Kota Semarang
- Cahyana, S., & Nugroho, S. (2019). Analisis Peran *Stakeholder* Desa Wisata Carangsari, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 7(2).
- Iqbal, Muhammad. (2007) Analisis Pemangku Kepentingan dan Implementasinya dalam Pembangunan Pertanian. *Jurnal Litbang Pertanian*, 26(3) : 89-99.
- Nugroho, A. Y., Rahman, A. Z., & Kismartini, K. (2022). PERAN *STAKEHOLDERS* DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA NONGKOSAWIT KOTA SEMARANG. *Journal of Public*

Policy and Management Review, 11(2), 315-335.

Muhajir, R., Nasrulhaq, N., & Tahir, N. (2022). Smart Governance Dalam Kebijakan Perencanaan Dan Penganggaran Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 3(1), 299-314.

Pratiwi, N. A. (2022). *PARTISIPASI MASYARAKAT MELALUI PENERAPAN APLIKASI JAKI PADA JAKARTA SMART CITY (STUDI KELURAHAN JATI PADANG)* (Doctoral dissertation, Universitas Nasional).